

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Di setiap negara dibutuhkan pemerintahan yang baik atau yang disebut *good governance*. Pemerintahan yang baik ini sendiri merupakan suatu bentuk keberhasilan dalam menjalankan tugas membangun negara, tata kelola negara, dan menjalankan tujuan serta rencana suatu negara tersebut. Menurut penelitian Temple (2002) dalam jurnal Robert, dkk (2016) menyatakan bahwa *“The restoration of financial discipline in local governments through enhanced reporting standards and practices would be an important step leading to improvements in the quality of municipal governance and the quality of citizen lives.”* Dalam menjalankan pemerintahan ini mengikuti prinsip-prinsip yang ada seperti adanya transparansi dan akuntabilitas pemerintahan.

Pada undang-undang No 32 tahun 2004 mengenai pemerintahan daerah menyatakan bahwa pemerintah daerah memiliki kewajiban untuk menyusun laporan keuangan secara periodik. Laporan keuangan sesuai dengan peraturan pemerintah No 8 tahun 2006 menyatakan bahwa laporan keuangan yang disusun oleh kepala satuan kerja perangkat desa yang dimaksudkan pada pasal 5 ayat 2 digunakan sebagai pertanggungjawaban terhadap pelaksanaan APBD pada satuan kerja perangkat daerah (SKPD) yang bersangkutan yang nantinya akan disampaikan pada gubernur/bupati/walikota melalui pejabat pengelolaan keuangan daerah.

Tujuan secara umum di buatnya laporan keuangan yaitu untuk memberikan informasi tentang posisi keuangan sebuah entitas, realisasi

anggaran, juga arus kas dan kinerja keuangan yang dimiliki oleh suatu entitas yang melakukan pelaporan yang nantinya akan memiliki manfaat bagi para pengguna laporan keuangan tersebut dalam membuat dan juga mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya yang ada. Menurut IPSASB, (2013a) dalam jurnal yang ditulis oleh Sandra, dkk (2017) mengatakan bahwa *“As explicitly stated in the conceptual frameworks of accounting standard setting bodies, the objective of financial reporting by public sector entities is to provide information about the entity that is useful to users”* yang mana kegunaan dalam konteks disini merupakan kegunaan untuk pembuat keputusan. Laporan keuangan yang dibuat oleh suatu entitas harus disusun dalam beberapa tahapan yang harus dilalui sebelum laporan keuangan tersebut dapat disajikan.

Laporan keuangan yang telah dibuat dan di susun dapat menggambarkan suatu kondisi yang sedang terjadi pada sebuah organisasi atau suatu entitas sehingga laporan keuangan yang telah memenuhi kriteria akan digunakan oleh pihak yang memiliki kepentingan yang nantinya akan digunakan sebagai dasar untuk pengambilan keputusan pihak-pihak tersebut.

Menurut Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan pada PP No 71 tahun 2010 yang menyebutkan bahwa karakteristik kualitatif laporan keuangan adalah ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya. Karakteristik tersebut yaitu: a) relevan, b) andal, c) dapat dibandingkan, d) dan dapat dipahami. Laporan keuangan harus memenuhi keempat syarat tersebut agar suatu entitas dapat mencapai tujuannya. Informasi yang terkandung dalam

laporan keuangan daerah harus memenuhi atau sesuai dengan nilai informasi yang disyaratkan dalam perundang-undangan. Menurut penelitian yang dilakukan Sukmaningrum (2012) apabila laporan keuangan yang dibuat oleh pemerintah daerah tidak sesuai dengan perundang-undangan yang ada, hal tersebut dapat mengakibatkan kerugian daerah, potensi kekurangan daerah, kekurangan penerimaan, kelemahan administrasi, ketidak hematatan, ketidakefisienan, dan ketidakefektifan.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Ryan (2016) menyatakan bahwa masih terdapat berbagai macam kasus mengenai buruknya kualitas laporan keuangan yang ada di Indonesia yang perlu dikaji lebih lanjut. Secara umum kualitas keuangan yang buruk dapat disebabkan karena penyusunan laporan keuangan belum memenuhi standar akuntansi pemerintah. Febri dkk (2015) melakukan penelitian pada SKPD yang ada di Jawa Tengah dan memberikan hasil berupa kualitas laporan keuangan Jawa Tengah belum mencapai kategori baik dikarenakan mayoritas yaitu sebanyak 66,7% laporan keuangan SKPD berada pada posisi cukup dan kurang, khususnya laporan tentang ikhtisar pencapaian kinerja keuangan, penjelasan pos-pos laporan keuangan, penjelasan secara rinci aset tetap. Hal tersebut disebabkan karena belum optimalnya penerapan sistem pengendalian internal, masih kurangnya sumberdaya manusia yang kompeten terutama dibidang keuangan, dan kurangnya sarana yang terkait dengan teknologi informasi akuntansi.

Masalah bisa saja timbul akibat kualitas laporan keuangan yang rendah. Kualitas laporan keuangan yang buruk bisa saja memberikan peluang bagi beberapa pihak untuk melakukan tindak kejahatan seperti adanya tindak

korupsi. Hal tersebut mungkin saja dapat terjadi karena kualitas laporan keuangan yang buruk sehingga beberapa pihak melakukan jual-beli opini audit untuk mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Dedi (2016) pada tulisannya yang mengatakan bahwa seperti yang terjadi pada tahun 2010, Komisi pemberantasan korupsi menangkap seorang auditor BPK Jawa Barat yaitu EH dengan aparat Pemkot Bekasi hanya untuk mendapatkan opini audit WTP¹ (Kompas,2016). Padahal pada Juni 2014 sebagai ketua BPK yaitu Rizal Djalil menyatakan bahwa BPK seharusnya membantu pemberantasan adanya tindak korupsi. Dedi Haryadi selaku Deputy Sekjen Transparansi Internasional Indonesia mengatakan bahwa hal tersebut dapat dihindari salah satunya dengan merevisi UU No 15 tahun 2006 mengenai BPK dengan memfokuskan revisi pada perekrutan anggota yang steril dari koneksi politik.

Undang-Undang No 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang berisi bahwa laporan pertanggungjawaban pemerintah atau laporan keuangan pemerintah yang telah disusun pada saatnya harus diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebelum disampaikan kepada pihak legislatif sesuai dengan kewenangan yang ada. Namun pada Kabupaten Klaten sendiri masih mendapat opini Wajar Dengan Pengecualian dari BPK dapat dilihat dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yang dicantumkan dalam website BPK Semarang.

Tabel 1.1 memberikan data mengenai hasil audit yang telah dilakukan oleh BPK pada LKPD kabupaten Kebumen selama lima tahun dihitung sejak tahun 2013-2017.

¹ Artikel diterbitkan oleh Kompas.com dengan judul “Korupsi Audit” oleh Dedi (2016).

Tabel 1. 1
Opini BPK untuk Laporan Keuangan SKPD Tahun
2013-2017 Kabupaten Klaten

Tahun	Opini BPK
2013	WDP (Wajar Dengan Pengecualian)
2014	WTP (Wajar Tanpa Pengecualian)
2015	WTP (Wajar Tanpa Pengecualian)
2016	WDP (Wajar Dengan Pengecualian)
2017	WDP (Wajar Dengan Pengecualian)

Sumber : semarang.bpk.go.id

Dapat dilihat bahwa pada tahun 2016 Klaten kembali mendapatkan opini Wajar Dengan Pengecualian oleh BPK dan begitu pula pada tahun 2017 Klaten masih mendapatkan opini Wajar Dengan Pengecualian. Plt Inspektur Inspektorat Kabupaten Klaten mengatakan bahwa opini WDP ini didapatkan oleh Kabupaten Klaten dikarenakan masalah dalam dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan juga kurang patuhnya terhadap undang-undang yang berlaku². Diketahui rekapitulasi laporan sekolah pada dana BOS dinilai kurang valid dan andal. Hal tersebut tentu dapat mempengaruhi kualitas laporan keuangan Kabupaten Klaten dikarenakan, untuk memenuhi standar kualitas laporan keuangan yang baik maka laporan keuangan tersebut harus memenuhi standarnya yang salah satunya yaitu harus bisa bersifat andal. Andal berarti laporan keuangan harus bersifat jujur yang memuat informasi berdasarkan fakta yang ada.

Dalam penelitian ini nantinya akan menggunakan penerapan teori stewardship dimana teori ini akan menjelaskan pemerintah daerah sebagai lembaga yang dipercaya oleh masyarakat bertindak sesuai dengan kepentingan

² Artikel diterbitkan oleh Soloraya.solopos.com dengan judul “ Klaten Gagal Meraih Opini WTP dari BPK, ini penyebabnya” oleh Taufik Prakoso (2018).

publik dengan melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai pemerintah daerah dengan tepat dan benar. Masyarakat nantinya akan mengevaluasi kinerja pemerintah dengan informasi yang didapatkan oleh masyarakat dalam bentuk laporan keuangan dimana laporan keuangan ini dituntut untuk memiliki tingkat kualitas yang baik. Hal tersebut ditujukan agar tujuan ekonomi, pelayanan publik, maupun kesejahteraan masyarakat dapat tercapai secara maksimal. Berdasarkan penelitian–penelitian terdahulu terdapat faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah daerah didaerah lain. Beberapa diantaranya yaitu pemahaman standar akuntansi pemerintah, penerapan sistem informasi akuntansi, kompetensi sumberdaya manusia, dan sistem pengendalian internal. Namun hasil penelitian terdahulu terkait dengan variabel independen terhadap variabel dependen, berbeda satu sama lain. Terlihat adanya ketidak-konsistenan terhadap hasil yang didapatkan pada tiap penelitian.

Undang-undang No. 17 tahun 2017 menerbitkan peraturan pemerintah No 24 tahun 2005 yang sekarang telah menjadi Peraturan Pemerintah No 71 tahun 2010 mengenai Standar Akuntansi Pemerintah (SAP). Standar Akuntansi Pemerintah merupakan persyaratan yang memiliki kekuatan hukum dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah. Standar Akuntansi Pemerintah merupakan standar atau prinsip-prinsip yang digunakan dalam pembuatan atau penyusunan dan dalam penyajian laporan keuangan pemerintah baik pemerintah pusat maupun daerah. Standar Akuntansi Pemerintah yang baik dan benar akan mewujudkan pengelolaan keuangan yang baik karena dengan pemahaman SAP yang baik akan memberikan

laporan pertanggungjawaban yang baik. Hal tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Sari (2014) yang menyatakan bahwa Standar Akuntansi Pemerintah berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan.

Adanya penerapan sistem informasi akuntansi pada pemerintahan dimaksudkan untuk salah satunya memudahkan dalam pembuatan laporan keuangan. Sistem informasi akuntansi dapat digunakan untuk mengubah data yang ada menjadi informasi yang nantinya akan digunakan didalam pengambilan keputusan. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Silviana (2014) memberikan hasil bahwa penerapan Sistem Informasi Akuntansi memiliki pengaruh terhadap kualitas suatu laporan keuangan. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Lilis, dkk (2014) dimana sistem informasi akuntansi tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan. Hal tersebut dikarenakan sistem informasi akuntansi yang ada masih belum dapat untuk mengurangi kesalahan yang terjadi.

Adanya Sistem Informasi Akuntansi yang diterapkan pada pemerintahan, tidak dapat dipisahkan dari Sumberdaya Manusia yang ada pada pemerintahan tersebut karena SIA memerlukan SDM yang berkompeten agar integrasi sistem dapat berjalan dengan baik sehingga pemerintah dapat menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas. Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Dewi dan Yusrawati (2015) yang menyatakan bahwa untuk menghasilkan laporan keuangan yang baik atau berkualitas perlu memperhatikan kompetensi aparatur pemerintah daerah yang terlibat dalam penyusunan laporan keuangan. Terbatasnya pegawai yang berlatar belakang

pendidikan di dalam bidang akuntansi akan menjadikan kurangnya pemahaman aparat pemerintah daerah dalam mengelola keuangan daerah dengan baik dan benar. Sehingga dapat dikatakan bahwa selain adanya Sistem Informasi Akuntansi, Sumberdaya Manusia yang kompeten juga dapat mempengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah. Hal tersebut tidak sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Zuliarti (2012) pada SKPD Kudus yang menyatakan bahwa kompetensi sumberdaya manusia tidak berpengaruh.

Penelitian yang dilakukan oleh Abiola (2013) mengatakan bahwa kualitas laporan keuangan juga dapat ditentukan pada seberapa baiknya sistem pengendalian internal yang dimiliki oleh pemerintah daerah sebagai tindakan yang dilakukan pada keuangan maupun non-keuangan. Sistem pengendalian internal yang baik akan membuat kinerja pemerintah menjadi lebih optimal sehingga memudahkan pemerintah mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dengan adanya sistem pengendalian internal yang jelas dan tepat maka akan ada pemisahan tugas terhadap para pegawai secara jelas, dan juga tidak akan ada pegawai pada pemerintahan daerah yang memiliki fungsi lebih dari satu atau merangkap lebih dari satu fungsi didalam penyusunan laporan keuangan pemda tersebut. Namun hal tersebut tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Novtania, dkk (2017), Desiana dkk (2014), Nurhasanah dkk (2018) yang menyatakan bahwa sistem pengendalian internal berpengaruh secara negatif terhadap kualitas laporan keuangan. Pada penelitian yang dilakukan oleh Brendhi (2018) mengatakan bahwa SPI tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan.

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan di atas, dapat dikatakan bahwa kualitas laporan keuangan dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain : pemahaman standar akuntansi pemerintah, penerapan sistem informasi akuntansi, kompetensi sumber daya manusia, dan sistem pengendalian internal. Penelitian ini dibuat untuk meneliti apakah faktor-faktor tersebut memiliki andil terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah di kabupaten Klaten. Rasa ingin tahu mengenai hal tersebut diharapkan dapat untuk memecahkan masalah terhadap kualitas laporan keuangan kabupaten Klaten yang berupa masalah pada dana BOS dan kurangnya mematuhi undang-undang yang berlaku agar kabupaten Klaten kembali mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian dari BPK.

Penelitian ini merupakan penelitian yang mengacu dari penelitian yang dilakukan oleh Wayan dan Gusti (2017). Penelitian tersebut dilakukan terhadap perangkat daerah yang berada di kabupaten Bangli. Pada penelitian tersebut kabupaten Bangli merupakan satu-satunya kabupaten yang mendapatkan opini wajar dengan pengecualian (WDP) di provinsi Bali. hal ini didasarkan pada : 1) Pemerintah Kabupaten Bangli telah memiliki kebijakan pencatatan, penyajian dan pengungkapan Aset Tetap, namun kebijakan tersebut belum dilaksanakan secara memadai dan belum mengatur mengenai penambahan masa manfaat yang berasal dari pekerjaan peningkatan dan pemeliharaan Aset Tetap. 2) Pokok - pokok kelemahan dalam sistem pengendalian intern atas Laporan Keuangan Kabupaten Bangli yang ditemukan BPK adalah, antara lain Pemerintah Kabupaten Bangli belum melakukan verifikasi dan validasi data piutang pajak bumi bangunan

perkotaan dan pedesaan (PBB-P2) dan pengelolaan aset tetap milik pemerintah Kabupaten Bangli belum tertib. 3) BPK menemukan adanya ketidakpatuhan dalam pengujian kepatuhan terhadap ketentuan Peraturan Perundang-Undangan pada Pemerintah Kabupaten Bangli. Permasalahan-permasalahan tersebut dapat mempengaruhi kualitas laporan keuangan yang dimiliki kabupaten Bangli.

Pada penelitian yang dilakukan oleh Wayan dan Gusti menunjukkan bahwa standar akuntansi pemerintahan, kompetensi sumberdaya manusia, dan sistem pengendalian internal berpengaruh secara positif terhadap kualitas laporan keuangan yang terdapat di kabupaten Bangli. Terdapat perbedaan dengan penelitian sebelumnya yaitu pada variabel penelitian kali ini menambah satu variabel yaitu sistem informasi akuntansi. Penambahan terhadap variabel ini dikarenakan teori-teori dan penelitian terdahulu yang dilakukan terhadap variabel sistem informasi akuntansi memberikan hasil bahwa penerapan SIA berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan yang dimiliki oleh daerah lain, juga akan memiliki pengaruh terhadap kualitas keuangan daerah kabupaten Klaten.

B. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah untuk penelitian ini yaitu :

1. Apakah pemahaman SAP berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan SKPD?
2. Apakah penerapan sistem informasi akuntansi berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan SKPD?

3. Apakah kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan SKPD?
4. Apakah sistem pengendalian internal berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan SKPD?

C. Tujuan

1. Untuk mengetahui pengaruh terhadap pemahaman SAP pegawai pemda terhadap kualitas laporan keuangan SKPD.
2. Untuk mengetahui pengaruh terhadap penerapan sistem informasi akuntansi yang digunakan oleh pemda terhadap kualitas laporan keuangan SKPD.
3. Untuk mengetahui pengaruh adanya kompetensi sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan SKPD.
4. Untuk mengetahui pengaruh terhadap sistem pengendalian internal terhadap kualitas laporan keuangan SKPD.

D. Manfaat Penelitian

1. Bagi pemerintah daerah, diharapkan dapat digunakan untuk meningkatkan kualitas dalam pelaksanaan pemerintahan daerah.
2. Bagi masyarakat atau pihak yang berkepentingan dapat digunakan untuk mengetahui kondisi pemerintah daerah sehingga dapat untuk pengambilan keputusan yang lebih baik.

E. Sistematika Penulisan Laporan Penelitian

Sistematika yang digunakan dalam penulisan proposal skripsi ini digunakan untuk mempermudah terhadap pemahaman dan juga untuk

memperjelas mengenai pembahasan sehingga penulisan proposal skripsi telah digolongkan ke dalam beberapa bab yang telah berurutan dan juga saling berkaitan, yaitu sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Pendahuluan memberikan penjelasan mengenai latar belakang suatu masalah yang akan diteliti, identifikasi mengenai masalah, rumusan masalah, mengenai tujuan dilakukannya penelitian, manfaat dilakukannya penelitian.

BAB II : LANDASAN TEORI

Landasan Teori akan menguraikan mengenai kajian teori-teori yang berhubungan dengan penelitian, hasil penelitian terdahulu yang dianggap relevan, dan juga hipotesis dari penelitian.

BAB III : METODE PENELITIAN

Pada metode penelitian ini akan menjelaskan metodologi penelitian yang digunakan, populasi dan sampel yang akan digunakan, data dan sumber data yang digunakan, metode pengumpulan data, variable-variabel yang digunakan, operasional variabel, dan juga berisi teknik dalam analisis data.

BAB IV : PEMBAHASAN

Pada pembahasan akan berisi mengenai temuan-temuan dari hasil penelitian yang telah dilakukan. Bab ini nantinya akan menjawab rumusan masalah pada penelitian atau menunjukkan bagaimana tujuan penelitian ini dicapai.

BAB V : PENUTUP

Pada bab ini berisi kesimpulan-kesimpulan dan saran. Kesimpulan berisi jawaban dari masalah yang ada dan mengemukakan hasil dari analisis yang telah dilakukan. Saran yang diberikan harus berasal dari pemikiran yang sehat, dan jelas. Saran yang diberikan juga harus mengacu pada kondisi ideal yang ada.